BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam akuntabilitas publik dan tata kelola keuangan pemerintahan. Laporan tersebut seharusnya mampu menyajikan informasi yang akurat, andal, jelas, relevan, tepat waktu, dan sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual agar menjadi dasar yang valid bagi pengambilan keputusan publik. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Bestari dan Wahyuni (2023) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian penyajian informasi keuangan, kelemahan sistem pengendalian intern, serta masih ditemukannya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejalan dengan itu, Haryati (2016) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah dan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada praktiknya masih belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif yang diharapkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan sektor publik.

Secara konseptual, kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang melibatkan sistem, prosedur, serta sumber daya manusia yang menjalankannya. Studi literatur yang dilakukan oleh Hasbullah et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi, serta budaya organisasi yang berkembang dalam institusi. Temuan

tersebut menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berdiri sendiri sebagai produk teknis akuntansi, melainkan merupakan refleksi perilaku individu dan praktik organisasi dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa faktor manusia menjadi determinan dominan dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, karena individu yang terlibat harus memahami prosedur, mematuhi regulasi, serta memiliki komitmen terhadap standar profesional dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, keberhasilan penyusunan laporan keuangan sangat bergantung pada perilaku aparatur yang menjalankan proses tersebut, bukan semata pada keberadaan sistem formal. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Kenny Irawan et al. (2025) menekankan bahwa kualitas informasi keuangan dipengaruhi oleh integrasi antara kompetensi individu, tanggung jawab profesional, serta nilai organisasi yang membentuk sikap kerja aparatur. Ketika nilai profesionalisme dan komitmen organisasi tidak berkembang secara optimal, maka pelaksanaan prosedur akuntansi cenderung bersifat administratif dan berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal, bukan pada penyajian informasi yang substantif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur akuntansi, tetapi juga memerlukan aparatur yang memiliki profesionalisme tinggi, menjunjung independensi dalam menjalankan tugas, serta memiliki komitmen organisasi yang kuat sehingga setiap proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara objektif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Urgensi permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK (2025), masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaan

dan pelaporan keuangan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering diperoleh, kualitas laporan keuangan secara substantif belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masalah reliabilitas dan kepatuhan terhadap SAP.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Permasalahan tersebut antara lain meliputi kesalahan pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan aset yang belum tertib, kelemahan sistem pengendalian internal, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan agar informasi yang disajikan lebih andal, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sistem dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dituntut memiliki profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi yang tinggi agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Temuan BPK menunjukkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum tentu mencerminkan kualitas penyajian informasi keuangan secara substantif. Hal ini disebabkan karena masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat memengaruhi reliabilitas, relevansi, dan akurasi informasi yang disajikan. Selain itu, kelemahan tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga kualitas laporan keuangan masih perlu terus ditingkatkan.

Selain hasil pemeriksaan BPK, organisasi masyarakat sipil seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyoroti bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kerap disusun secara formalistik untuk memenuhi syarat audit, tetapi belum sekaligus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas substantif. ICW menekankan bahwa opini audit tidak selalu menggambarkan integritas laporan ketika masih terdapat ruang untuk manipulasi angka atau ketika laporan hanya dipersiapkan untuk "memenangkan" opini audit tanpa memperbaiki kelemahan struktural dan perilaku dalam pelaporan. Kritik ini mempertegas bahwa masalah kualitas laporan keuangan bukan hanya tentang standar yang ditetapkan, tetapi perilaku manusia dan budaya organisasi yang melatarbelakanginya.

Fenomena permasalahan laporan keuangan sektor publik tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Beberapa penelitian internasional relevan menunjukkan kaitan antara kualitas laporan keuangan dengan perilaku organisasi dan profesionalisme aparatur:

1. Rakhman & Wijayana (2024) dalam *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* menemukan bahwa *human development index* yang mencerminkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah lokal, karena kinerja aparatur yang profesional cenderung menghasilkan laporan yang lebih akurat dan sesuai standar.
2. Mediaty et al. (2025) di *Journal of Risk and Financial Management* menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan komitmen organisasi aparatur berkontribusi positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Studi tersebut menekankan bahwa kualitas perilaku organisasi memegang peran penting dalam menghasilkan informasi yang dapat dipercaya.
3. Nuswantoro & Rahmawati (2025) dalam *Journal of Accounting and Investment* menyimpulkan bahwa meskipun SAP telah diadopsi secara nasional, kualitas laporan keuangan pemerintah lokal masih sangat dipengaruhi oleh karakteristik

perilaku aparatur penyusun laporan, bukan hanya faktor struktural atau ukuran organisasi.

4. Zhang et al. (2025) melakukan riset di China menunjukkan bahwa setelah reformasi sistem pelaporan, kualitas laporan pemerintah lokal masih mengalami masalah dalam *timeliness* dan *reliability* karena perilaku organisasi dan kurangnya independensi aparatur dalam menyusun pelaporan fiskal.

Berdasarkan temuan-temuan riset global, kualitas laporan keuangan sektor publik tidak hanya ditentukan oleh penerapan ketentuan teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh perilaku sumber daya manusia, budaya organisasi, serta komitmen terhadap akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan. Selain itu, independensi dalam proses pelaporan turut berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan dapat dipercaya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010), kualitas laporan keuangan daerah diukur melalui enam dimensi yang umum digunakan dalam literatur akuntansi sektor publik dan hasil audit independen:

1. Keakuratan Informasi Keuangan

   Menilai sejauh mana laporan bebas dari kesalahan material dan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

   Alat ukur: deviasi nilai saldo laporan versus nilai audit, temuan kesalahan akuntansi materiil.
2. Keandalan dan Objektivitas Penyajian

   Menilai apakah laporan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

   Alat ukur: jumlah temuan bias penyajian atau ketidakpatuhan SAP dalam hasil audit.
3. Kejelasan dan Kemudahan Dipahami

   Menilai sejauh mana laporan disusun sistematis dan jelas.

Alat ukur: skor keterbacaan laporan, penilaian oleh pengguna laporan (*stakeholder survey*).

4. Manfaat Informasi bagi Pengambilan Keputusan Publik
   Mengukur relevansi informasi bagi DPRD, pemda, BPK dan masyarakat.
   Alat ukur: survey relevansi informasi terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.
5. Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Laporan
   Menilai apakah laporan disusun dan disampaikan sesuai jadwal.
   Alat ukur: perbandingan tanggal penyampaian dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan.
6. Kepatuhan terhadap SAP berbasis akrual
   Mengukur konsistensi laporan dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
   Alat ukur: skor temuan ketidakpatuhan SAP pada hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan fenomena permasalahan serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kualitas laporan keuangan daerah belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kondisi tersebut tercermin pada aspek relevansi yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyajian informasi, serta aspek keandalan yang masih menghadapi permasalahan berupa kesalahan pencatatan dan pengelolaan aset. Selain itu, aspek keterbandingan masih dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan penerapan kebijakan akuntansi, sedangkan aspek keterpahaman belum optimal karena pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan masih belum memadai.

Meskipun berbagai studi telah mengeksplorasi determinan kualitas laporan keuangan, penelitian di tingkat nasional yang ada masih cenderung:

1. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, namun sebagian besar masih menggunakan indikator yang bersifat umum dan belum sepenuhnya mengacu pada

karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

2. Secara normatif, penerapan SAP seharusnya menghasilkan laporan keuangan berkualitas, namun temuan BPK masih menunjukkan kesalahan pencatatan, pengelolaan aset yang tidak tertib, dan kelemahan pengendalian internal.
3. Penelitian terdahulu umumnya menguji pengaruh faktor-faktor organisasi secara parsial, sehingga masih terbatas penelitian yang mengkaji secara simultan pengaruh profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi Aparatur Sipil Negara terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Penelitian sebelumnya lebih berbasis teori, sementara fenomena empiris berupa temuan BPK belum digunakan sebagai dasar konseptual penelitian.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai dasar pengukuran kualitas laporan keuangan serta menguji secara simultan pengaruh profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Adapun kebaruan pada penelitian ini yang memiliki kontribusi sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan indikator kualitas laporan keuangan yang secara langsung diturunkan dari karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam SAP.
2. Kualitas laporan keuangan dianalisis sebagai hasil perilaku profesional ASN, bukan hanya output sistem akuntansi.
3. Penelitian ini menguji profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. Model penelitian dibangun berdasarkan fenomena nyata temuan audit pemerintah.

Selain fenomena empiris yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah juga masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa profesionalisme dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya mengkaji variabel tersebut secara terpisah dan belum banyak yang menguji secara simultan pengaruh profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi ASN terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melalukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Dan Komitmen Organisasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara**"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang saling berkaitan dan menjadi dasar penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang tercermin dari masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kesalahan pencatatan, pengelolaan aset yang belum tertib, serta kelemahan sistem pengendalian internal.

2. Terdapat kesenjangan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara normatif dengan praktik penyusunan laporan keuangan di lapangan, yang menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan sistem akuntansi belum sepenuhnya menjamin kualitas laporan keuangan daerah.
3. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kerja, khususnya dalam aspek ketelitian, tanggung jawab profesional, dan kepatuhan terhadap prosedur akuntansi pemerintahan.
4. Independensi ASN pengelola keuangan belum optimal dalam proses pelaporan keuangan, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas penyajian informasi serta efektivitas pelaksanaan pengendalian internal.
5. Komitmen organisasi ASN dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas belum sepenuhnya terwujud, yang ditunjukkan oleh masih adanya kelalaian administratif, kurangnya kepatuhan terhadap prosedur kerja, serta berulangnya temuan audit dari tahun ke tahun.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan dapat diukur hasilnya, maka ruang lingkup penelitian perlu dibatasi pada aspek-aspek tertentu. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, sebagai unit kerja yang berperan langsung dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Variabel yang diteliti dibatasi pada tiga faktor utama, yaitu:
    - Profesionalisme ASN, yang mencakup sikap tanggung jawab, etika kerja, dan komitmen terhadap standar profesi dalam melaksanakan tugas laporan keuangan.

- Independensi ASN, yang didefinisikan sebagai kemampuan aparatur dalam mengambil keputusan dan menyusun laporan keuangan secara objektif tanpa tekanan dari pihak internal maupun eksternal.
- Komitmen organisasi ASN, adalah tingkat keterikatan psikologis ASN terhadap organisasi yang tercermin dalam kesediaan untuk berkontribusi, loyalitas, dan keinginan mempertahankan keanggotaan dalam organisasi, serta kesungguhan dalam mencapai tujuan organisasi.

3. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu keakuratan informasi keuangan, keandalan dan objektivitas penyajian laporan, kejelasan dan kemudahan dipahami, manfaat informasi bagi pengambilan keputusan publik, ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan, serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta didukung oleh dokumentasi yang relevan. Oleh karena itu, hasil penelitian mencerminkan persepsi responden terhadap kondisi profesionalisme, independensi, komitmen organisasi, dan kualitas laporan keuangan pada saat penelitian dilakukan.
5. Penelitian ini tidak membahas faktor eksternal seperti sistem pengendalian internal pemerintah daerah secara menyeluruh, kebijakan fiskal pusat, maupun aspek politik daerah, karena fokus penelitian diarahkan pada pengaruh perilaku individu ASN terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme ASN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah independensi ASN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah komitmen organisasi ASN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Apakah profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi ASN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor perilaku aparatur sipil negara (ASN) yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh profesionalisme ASN terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Menganalisis pengaruh independensi ASN terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi ASN terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Menganalisis pengaruh profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi ASN secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis (Akademis)
    1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai faktor-faktor perilaku aparatur sipil negara (ASN) yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.
    2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan teori terkait profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi ASN dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
    3) Penelitian ini memberikan inovasi akademis melalui pendekatan simultan terhadap tiga variabel perilaku ASN profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi yang selama ini sering diteliti secara terpisah, sehingga dapat memperkuat model konseptual hubungan antara perilaku ASN dan kualitas laporan keuangan.
2. Manfaat Praktis
    1) Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan komitmen organisasi, profesionalisme, dan independensi ASN, guna memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah.
    2) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang program pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan etika profesi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
    3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris dan dasar pengembangan studi lanjutan yang berfokus pada peningkatan

kinerja ASN dan reformasi sistem laporan keuangan di instansi pemerintah daerah lainnya.